

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
PIMPINAN DAERAH IKATAN PEMUDA TARBİYAH ISLAMİYAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR: 028 /HM.02.00/K.SB-08/11/2022

NOMOR: 002 / IP TI / PESSSEL /KS/ 11 /2022

Pada hari ini, Senin, tanggal Tujuh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Saga Murni Hotel, yang bertanda tangan di bawah ini,

Erman Wadison, S. Hum

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan Abdul Muin, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Heru Kisananto, S.Ag

: Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Tabek Tinggi, Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengawasan partisipatif, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

- (4) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan.



PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- Ruang lingkup Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang di bawah ini:
- a) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** demi suksesnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
 - b) Kerja sama pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan kepemiluan, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
 - c) pertukaran dan publikasi data dan/atau informasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data dan/atau informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerja sama untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk,

- a) Pembentukan kelompok pengawasan bersama;
- b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan isu seputar pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 kepada masyarakat;
- c) Pelatihan teknis kepada kelompok penyelenggara *ad hoc*; dan
- d) Penyebarluasan informasi melalui media sosial mengenai pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

PARAF	PARAF
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kerja sama atas persetujuan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan atau *adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan berkekuatan hukum tetap serta setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PARAF
	

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA,



Erman Wadison, S.Hum

PIHAK KEDUA
PIMPINAN DAERAH IKATAN
PEMUDA TARBIYAH ISLAMİYAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA,



Heru Kisananto, S.Ag

PARAF	PARAF
